

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa

Muh. Zulkarnain
(Peneliti Independen)
Email: muhzulkarnain2016@gmail.com

Abstract

This study aims to determine The Role of Village Government in Community Empowerment in Tamaona Village in Gowa regency As well as the factors that influence it and the factors that influence it. To Archive the target. This Research Used qualitative research methods by parsing data descriptively. Technique of data collecting done by observation and interview. As well as documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques.

The results showed: First, the role of government as a coach focuses on human development by providing counseling and socialization of the program, business development by providing capital assistance, seed assistance, agricultural fertilizer, community development built in the spirit of mutual cooperation and instilling religious values in the community, and institutional development by establishing harmonious relationships, Provide direction and support to community institutions in Tamaona Urban Village. Both, factors affecting community empowerment in Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa include supporting and inhibiting factors. Supporting factors are community participation, community awareness and education level of the community. The factors that become obstacles are budget constraints, people's mindset and binding rules.

Keywords : *the role of government, community, empowerment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Peran pemerintah sebagai bina manusia dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan serta pelibatan masyarakat secara partisipatif, bina usaha dengan memberikan bantuan modal, bantuan bibit, pupuk dan asuransi padi, bina lingkungan dibangun dengan semangat gotong royong dan menanamkan nilai keagamaan di lingkungan masyarakat, dan bina kelembagaan dengan menjalin hubungan harmonis, memberikan arahan serta dukungan pada lembaga masyarakat di Kelurahan Tamaona. Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat. Adapun faktor yang menjadi penghambat yakni keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat dan aturan yang mengikat.

Kata kunci: *peran pemerintah, pemberdayaan, masyarakat*

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah.

Pada hakekatnya upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud nyata yang akan dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (power) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan (Widjajanti 2011). Pemberian kekuatan yang dimaksud adalah transformasi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang diberikan melalui beberapa kegiatan. Cakupan kegiatan tersebut dapat berupa bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan (Mardikanto 2010). Tidak hanya kegiatan yang dilakukan menjadi poros pemberdayaan, namun partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan mempunyai pengaruh signifikan.

Oleh karena itu peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan. Untuk mewujudkan

pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan untuk kepentingan bersama.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat yaitu Kelurahan Tamaona merupakan Ibukota di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa secara geografis Kelurahan Tamaona memiliki potensi cukup strategis dengan luas wilayah 12,38 Km² dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani sebanyak 702 jiwa. Hal ini dikarenakan sebagian besar penggunaan tanahnya yang berjumlah 241,40 ha digunakan untuk lahan pertanian. Melihat besarnya potensi kelurahan tamaona untuk berkembang sangat disayangkan jika melihat income perkapita masyarakat yang masih rendah berkisar ± 512.330/bulan, terlebih kelurahan tamaona merupakan ibukota dari kecamatan tombolo pao. Selain itu melihat rekap tingkat kesejahteraan masyarakat dari 882 KK yang ada di Kelurahan Tamaona, rumah tangga miskin masih terdapat 329 KK dalam kategori pra sejahtera dan kategori sejahtera 1.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, ketersediaan akses sumber daya merupakan penunjang dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana seperti jalan tani yang dapat mengembangkan potensi sumber daya alam pembangunannya masih kurang maksimal seperti lokasi pertanian di dusun mappadang dan dusun datarang yang banyak dikeluhkan masyarakat terkait pembangunannya yang tidak berkelanjutan

dan kualitas pembangunannya yang masih kurang. Menurut salah seorang tokoh masyarakat di kelurahan tamaona Bapak P. Buang mengatakan: “ Memang sulit sekali di kelurahan karena kurangnya anggaran beda dengan didesa punya ADD, di kelurahan terbatas. bahkan yang saya dengar anggaran fisik yang didanai oleh ADK dihapuskan tahun ini”. Senada dengan yang dikatakan salah satu staf kesekretariatan di Kelurahan Tamaona Bapak Yahya mengatakan “ Anggaran Dana Kelurahan memang sedikit, dana itu hanya habis di biaya operasional saja”.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan tamaona kabupaten gowa, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan tamaona kabupaten gowa

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang tentang peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis

data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah kelurahan merupakan faktor penentu dalam pembangunan dan pemberdayaan di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga keberhasilan pembangunan di kelurahan tergantung dari seberapa besar peranan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerjanya masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintah kelurahan diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa pemerintah kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur di pasal 5 ayat (1) bahwa lurah mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Di Kelurahan Tamaona memiliki berbagai macam program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dikerjakan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan Tamaona mencakup pemberdayaan kelompok tani, pengembangan modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan, peminjaman modal untuk kelompok tani, dan pembinaan

keagamaan. Dari keseluruhan program pemberdayaan dikelurahan tamaona berfokus pada pengembangan masyarakat melalui lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan Tamaona. (a) Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona. Pengembangan kapasitas manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan. Upaya pemerintah kelurahan tamaona dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui bina manusia dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan program didominasi penyuluhan dibidang pertanian dikarenakan potensi utama wilayah kelurahan ada dibidang pertanian dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani.

Penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan kelompok tani bermacam-macam seperti penyuluhan jajar legowo (pola tanam), sosialisasi PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan), serta pertemuan rutin kelompok tani.

Dari sosialisasi yang diadakan dibidang pertanian tentunya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat petani, baik cara menanam padi secara modern, pemberantasan hama serta diberikan bekal pengetahuan dengan tidak hanya bertani secara lokal tapi memasukkan industrialisasi dan modernisasi pertanian seperti bertani secara holtikultura supaya masyarakat bisa berkembang dan mendapatkan pendapatan yang lebih bagus.

Akan tetapi sosialisasi yang diadakan belum maksimal terlihat dari sosialisasi yang diadakan tidak menjangkau keseluruhan masyarakat petani dan pola pikir masyarakat yang susah menerima begitu saja pengetahuan yang diberikan sehingga

kecenderungan sosialisasi yang diadakan tidak memberikan dampak apapun. (b) Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina usaha dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona. Bina usaha diwujudkan dengan pengembangan kapasitas usaha, bina usaha menjadi suatu upaya yang sangat penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia tanpa bina usaha tidak memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan justru menimbulkan kekecewaan.

Dikelurahan tamaona bina usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok kecil dan bina usaha dibidang pertanian diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan bibit, pupuk, serta adanya pula asuransi padi yang tersedia seperti bantuan modal untuk kelompok simpan pinjam perempuan yang tentunya dapat membantu mengembangkan usaha mereka sehingga mereka punya daya untuk berkembang.

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu program yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dalam rangka membantu pengembangan usaha mereka. Setiap kelompok menerima besaran yang berbeda-beda, begitu juga untuk setiap orang menerima pinjaman berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kemampuan.

Selain bantuan modal kelompok simpan pinjam bentuk bina usaha yang ada dikelurahan tamaona adalah dalam bentuk bantuan ke pengembangan usaha kelompok tani baik bantuan modal yang diberikan maupun bantuan bibit, pupuk dan pungsida yang diberikan serta adanya asuransi padi.

Bantuan modal pinjaman untuk petani sangat membantu perekonomian petani, ini merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan perekonomian para petani dikelurahan tamaona. Meskipun bunganya cukup tinggi akan tetapi petani merasa

sangat terbantu dengan modal bantuan tersebut.

Meskipun ada bantuan bibit dan pupuk melalui kelompok tani yang mengajukan rancangan defenitif kelompok akan tetapi tidak mempunyai impact yang signifikan bagi peningkatan usaha petani dikarenakan butuh waktu lama untuk mendapatkan bantuan itu. Selain bantuan bibit yang disubsidi pemerintah akan tetapi menurut masyarakat harganya sangat mahal jadi masyarakat cenderung membuat bibit padi sendiri dengan cara lokalnya meskipun kualitasnya memang berbeda, bibit yang dibuat secara lokal memang tidak merata ukurannya sehingga hasil pertaniannya juga tidak mempunyai kualitas yang baik.

Selain bantuan bibit, pupuk dan fungsida juga terdapat asuransi padi yang bertujuan agar petani mendapatkan jaminan dengan serangan hama dan berbagai penyebab gagal panen. Jadi pendaftar asuransi padi yang kemudian gagal panen akan mendapat modal untuk menanam. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan asuransi untuk menjamin padi yang ditanam oleh petani. (c) Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona. Dalam pembinaan lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial, pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Tamaona bisa dikatakan kelurahan swadaya baik dalam menjaga pembangunan fisik ataupun membangun suasana dan iklim yang kondusif ke masyarakat dibangun dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Selain melalui gotong royong pembinaan lingkungan sosial juga dilakukan

dengan pembinaan keagamaan, agama diyakini menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Pembinaan keagamaan di Kelurahan Tamaona diwujudkan dengan membentuk pengurus masjid di setiap masjid yang ada sehingga kegiatan kelurahan yaitu pengajian rutin bisa dikontrol, selain itu diberikan pula kursus untuk da'i, pendataan untuk penceramah yang ada dan tunjangan imam dusun dan imam rawatib untuk memotivasi mereka melanjutkan syiar agama.

Peran Pemerintah Kelurahan sebagai bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona

Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha, bina lingkungan mensyarakatkan tersedianya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif. Artinya, bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting dari pembentukannya seberapa jauh kelembagaan yang telah terbentuk itu telah berfungsi secara efektif.

Pembinaan terhadap lembaga masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga masyarakat. Menurut Santoso S. (1995:52) mengungkapkan beberapa cara dilakukan dalam pembinaan adalah: pemberian bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan pendidikan dan pelatihan, memberikan instruksi dan memberikan buku petunjuk.

Dikelurahan Tamaona pembinaan terhadap lembaga masyarakat dilakukan dengan memberikan arahan, pelayanan atau rekomendasi kegiatan yang mudah dan cepat, memfasilitasi kegiatan lembaga masyarakat serta memberikan dukungan

kepada lembaga yang ada untuk pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat tersebut.

Selain pembinaan dari pemerintah ke lembaga masyarakat terdapat pula pembinaan ke lembaga pemerintah itu sendiri dalam bentuk jumat ibadah yang dilakukan setiap minggu di hari jum'at. Jadi setiap hari jumat sebelum memulai aktivitas aparat kelurahan, dihadirkan penceramah untuk memberikan siraman qalbu ke aparat pemerintah agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Salah satu faktor penentu dalam keberhasilan sebuah program adalah kerjasama antar stakeholder yang ada, pemerintah kelurahan tidak mampu berjalan sendiri tanpa bantuan lembaga masyarakat. Pembinaan kelembagaan di kelurahan tamaona mendapat perhatian dari pemerintah kelurahan sehingga program-program lembaga masyarakat dapat berjalan sesuai dengan kehendak pemerintah dan lembaga masyarakat. (d) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa. Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor yang mendukung peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yakni: pertama, partisipasi masyarakat merupakan faktor utama terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, mulai dari partisipasi ide/ pikiran melalui forum musrenbang, dan didominasi oleh partisipasi tenaga dikarenakan dominasi program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan swadaya seperti pengerjaan irigasi pertanian dan pembuatan jalan tani baru, masyarakat sangat antusias dalam pengerjaannya disebabkan masyarakat memahami bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan mereka.

Kedua, Keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan timbul begitu saja, tetapi karena adanya faktor yang mendorongnya untuk berpartisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan kesadaran yang muncul, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam merumuskan visi pembangunan, dengan begitu tujuan dari pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Ketiga, Tingkat pendidikan di kelurahan cukup tinggi sudah sadar dengan namanya pendidikan, dimana jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SLTA maupun Perguruan Tinggi cukup tinggi begitupun tamatan pendidikan mereka sudah bagus, mereka sudah sadar tentang pendidikan dikarenakan biaya pendidikan yang sudah di gratiskan serta kemauan masyarakat untuk mengembangkan sumber daya manusia sudah baik dan juga ditunjang dengan sarana pendidikan yang sudah baik dilihat dari keberadaan sekolah hampir ada di setiap lingkungan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa yakni: Pertama, Keterbatasan anggaran dalam sebuah program dapat membuat program yang direncanakan terkendala sebab segala sesuatunya butuh biaya terlebih dengan pemberdayaan dalam pengembangan akses sumber daya butuh biaya yang sangat besar sehingga tanpa anggaran program itu tidak bisa terlaksana. Anggaran yang terbatas mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan menjadi terhambat. Terkadang ada suatu permasalahan yang mendesak dikerjakan lalu tidak ada anggaran yang diperuntukkan untuk hal tersebut pemerintah kelurahan memanfaatkan swadaya dari masyarakat.

Kedua, pola pikir adalah cara berpikir seseorang dalam mewujudkan ide, rencana dan cita-citanya yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh perasaan dan pandangannya ataupun sikap perilaku (attitude). Dengan kata lain pada suatu saat sikap seseorang dipengaruhi oleh perasaan atau emosinya. Di Kelurahan Tamaona pola pikir masyarakat yang susah menerima hal-hal baru terdapat pula pola pikir masyarakat yang statis dan acuh terhadap pembangunan yang dilakukan. Pola pikir masyarakat yang acuh terhadap proses pembangunan serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap sebuah program menjadi suatu kendala terhadap keberhasilan tujuan pemberdayaan masyarakat, begitupula dengan pola pikir yang lambat menerima hal-hal baru meskipun hal baru tersebut dapat meningkatkan harkat martabat mereka.

Ketiga, Aturan yang mengikat, beberapa peraturan dinilai menghambat dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk peraturan tentang pengangkatan perangkat desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Terkadang aturan dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi kewilayahan disuatu daerah dan ini dirasakan di Kelurahan Tamaona dimana perangkat kelurahan semisal pengangkatan kepala lingkungan yang harus memenuhi persyaratan administrasi sehingga terkadang tokoh kharismatik yang dimiliki dan mampu di dengar oleh masyarakat tidak memenuhi persyaratan administrasi didalam pengangkatan menjadi kepala lingkungan sehingga yang terjadi program pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat dan kurangnya partisipasi masyarakat didalamnya.

KESIMPULAN

Peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona diwujudkan dengan empat garis besar yakni Bina Manusia, dimana dalam bina manusia dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan program pemberdayaan serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan, kedua bina usaha bina usaha berfokus pada pengembangan usaha kelompok dengan memberikan pinjaman modal baik ditujukan untuk kelompok simpan pinjam maupun kelompok tani, bina usaha dibidang pertanian diwujudkan dengan berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal ataupun dalam bentuk bantuan bibit, pupuk, serta ada pula asuransi padi yang tersedia. Ketiga Bina Lingkungan Pemberdayaan masyarakat dalam bina lingkungan baik menjaga lingkungan alam maupun lingkungan sosial, pemerintah kelurahan menerapkan sistem gotong royong jadi membina lingkungan alam dan lingkungan sosial dengan semangat gotong royong. Keempat bina kelembagaan. Pemberdayaan masyarakat dalam bina kelembagaan dilakukan dengan memberikan arahan, pelayanan atau rekomendasi kegiatan yang mudah dan cepat, memfasilitasi kegiatan lembaga masyarakat serta memberikan dukungan kepada lembaga yang ada untuk pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat tersebut.

Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor pendukung terdiri dari partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, kesadaran masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat yang sudah tinggi. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari keterbatasan anggaran, pola pikir masyarakat yang beragam serta aturan yang mengikat

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora. Bandung
- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Affandi, A. (1996). *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Prisma, Jakarta
- Aprilia Theresia, K (2015), *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung
- Beratha, I. (1982). *Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hikmat, H (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press (HUP), Bandung
- Inu Kencana Syafie. (1994). *Etika Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Maskun, S. (1993). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Media widya Mandala, Yogyakarta
- Prasadja, B.(1982). *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. CV.Rajawali, Jakarta
- Prijono, O (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Siagian, S. (2008). *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Surjono, A. (2008). *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Syarifin, J. (2006). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. CV.Pustaka Setia, Bandung
- Tahir Malik, D. (2010), *Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar
- Totok Mardikanto, P, (2013), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Usman, S (1998). *Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar